

DAFTAR ISI

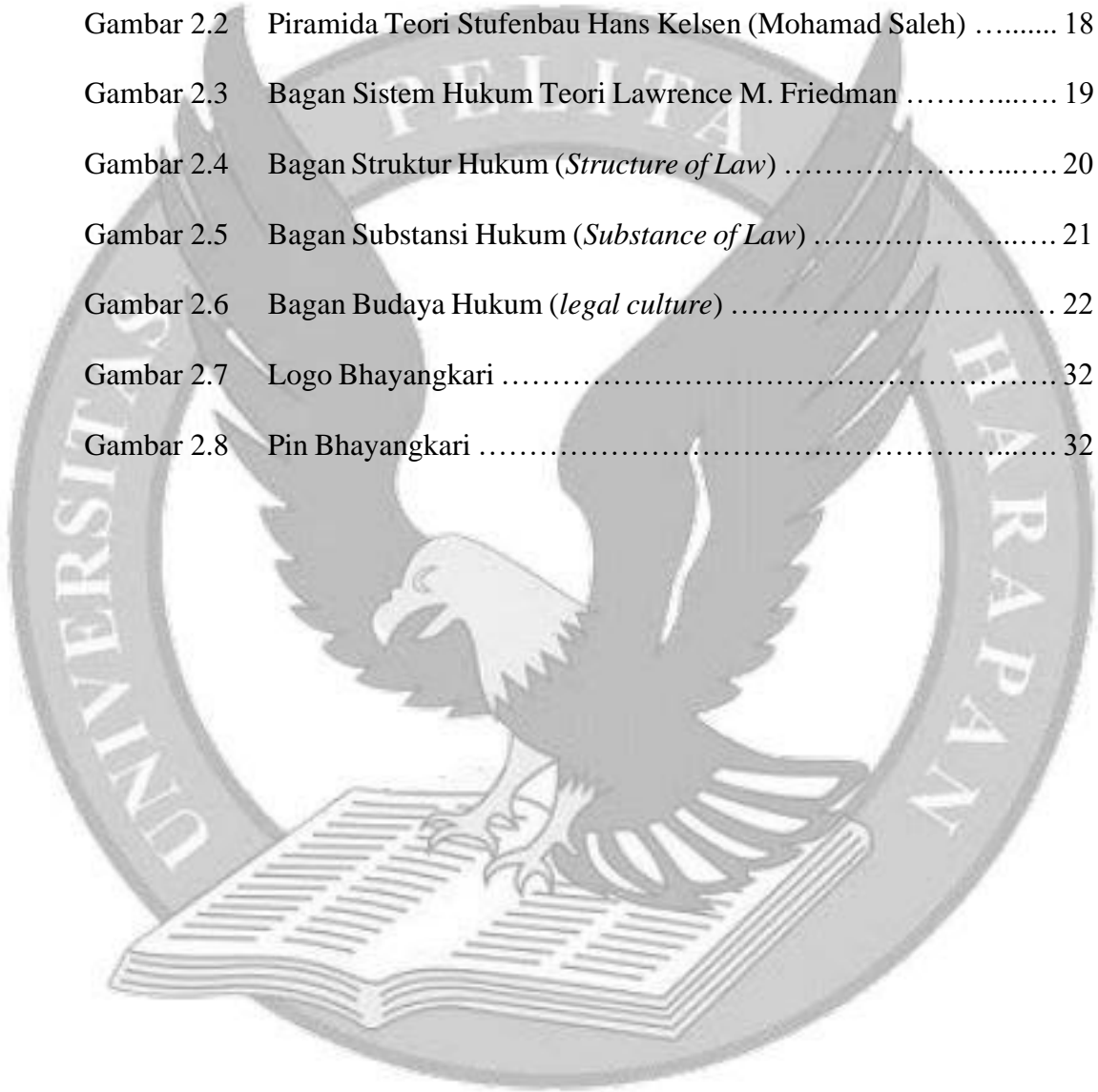
Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Teori	16
2.1.1 Teori Stufenbau dalam Peraturan Kepolisian dan Peraturan Bhayangkari	16
2.1.2 Teori Sistem Hukum (<i>Legal System</i>) Lawrence M. Friedman dalam Implementasi Peran Ganda Istri Polisi sebagai Polwan	18
1.2 Tinjauan Konseptual	23
2.2.1 Disharmoni Hukum, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Bhayangkari	23
2.2.2 Pengertian Peran Ganda Perempuan	36
2.2.3 Kedudukan Suami Istri Menurut Undang-undang, Pakar, Akademisi, dan Agama	39
2.2.4 Tugas dan Fungsi Polwan Ditinjau dari Peraturan Kepolisian dan Bhayangkari	47

2.2.5	Resiliensi Peran Ganda Polwan	51
BAB III	: METODE PENELITIAN	56
3.1	Jenis Penelitian	59
3.2	Jenis Data	61
3.3	Teknik/Metode Pengumpulan Data (Cara Perolehan Data)	62
3.4	Jenis Pendekatan	66
3.5	Sifat Analisis data	68
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	72
4.1	Hasil Penelitian tentang Polwan di Beberapa Negara	72
4.2	Analisis Norma Pengaturan Hukum Kedudukan Polwan dalam Menjalankan Peran Ganda sebagai Anggota Polri dan Anggota Bhayangkari	88
4.2.1	Norma Pengaturan Kedudukan Polwan sebagai Anggota Polri	88
4.2.2	Norma Pengaturan Kedudukan Polwan sebagai Anggota Bhayangkari	96
4.3	Analisis Implementasi Seorang Polwan dalam Menjalankan Profesi sebagai Anggota Polri Sekaligus sebagai Anggota Bhayangkari	100
4.3.1	Konflik Peran	100
4.3.2	Dilema Hierarki	103
4.3.3	Problem Pengambilan Keputusan	106
4.3.4	Pengaruh Peran Ganda terhadap Kinerja dan Kesejahteraan	107
4.3.5	Konsekuensi atas Perbuatan Polwan terhadap Organisasi Polri maupun Organisasi Bhayangkari	109
4.3.6	Kebutuhan Pengaturan yang Lebih Jelas	111
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1	Kesimpulan	116
5.2	Saran	119
DAFTAR PUSTAKA		xv
DAFTAR LAMPIRAN		xxvii

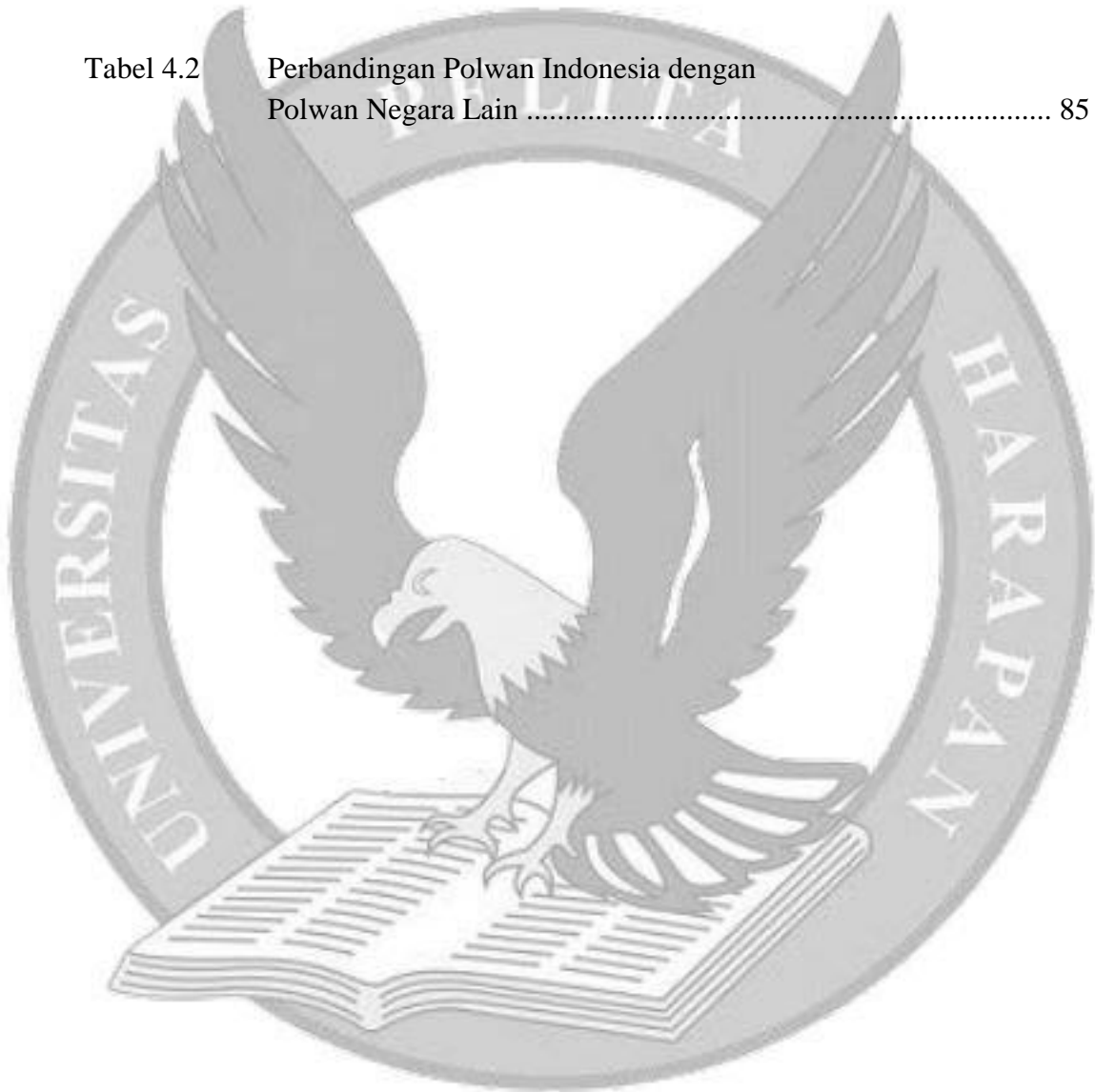
DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Piramida Teori Stufenbau Hans Kelsen (Adji Samekto)	17
Gambar 2.2 Piramida Teori Stufenbau Hans Kelsen (Mohamad Saleh)	18
Gambar 2.3 Bagan Sistem Hukum Teori Lawrence M. Friedman	19
Gambar 2.4 Bagan Struktur Hukum (<i>Structure of Law</i>)	20
Gambar 2.5 Bagan Substansi Hukum (<i>Substance of Law</i>)	21
Gambar 2.6 Bagan Budaya Hukum (<i>legal culture</i>)	22
Gambar 2.7 Logo Bhayangkari	32
Gambar 2.8 Pin Bhayangkari	32



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Gaji Pokok Anggota Polri Diluar Tunjangan	81
Tabel 4.2 Perbandingan Polwan Indonesia dengan Polwan Negara Lain	85



DAFTAR SINGKATAN



AD	: Anggaran Dasar
AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi
AKP	: Ajun Komisaris Polisi
Akpol	: Akademi Kepolisian
ART	: Anggaran Rumah Tangga
AS	: Amerika Serikat
Bhayangkari	: Persatuan Istri Polisi
Bripka	: Brigadir Polisi Kepala
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women</i>
Dikmaslantas	: Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas
dll	: dan lain-lain
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GP	: Gaji Pokok
HAM	: Hak Asasi Manusia
IP	: Ilmu Pengetahuan
Kadiv	: Kepala Divisi
Kamdagri	: Keamanan dalam Negeri
Kamseltibcar	: Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran
Kapolda	: Kepala Kepolisian Daerah
Kapolres	: Kepala Kepolisian Resor
Kapolri	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kasat Lantas	: Kepala Satuan Lalu Lintas
Kasatfung	: Kepala Satuan Fungsi
Kasatwil	: Kepala Satuan Wilayah
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KEPP	: Kode Etik Profesi Kepolisian
KIP	: Kartu Istri Polri
KKEP	: Komisi Kode Etik Kepolisian
Kombes. Pol.	: Komisaris Besar Polisi
Kompol	: Komisaris Polisi
Korpri	: Korps Pegawai Republik Indonesia
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KTA	: Kartu Tanda Anggota
Lalin	: Lalu Lintas
Mabes	: Markas Besar
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NAWLEE	: <i>The National Association of Women Law Enforcement Executives</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia

No.	: Nomor
P3RI	: Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia
Pama	: Perwira Pertama
Pamen	: Perwira Menengah
Pati	: Perwira Tinggi
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perkap	: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Perpol	: Peraturan Kepolisian
Perpres	: Peraturan Presiden
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polda	: Kepolisian Daerah
Polki	: Polisi Laki-laki
Polres	: Kepolisian Resor
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
Polsek	: Kepolisian Sektor
Polwan	: Polisi Wanita
PP	: Peraturan Pemerintah
Proja	: Program Kerja
Propam	: Profesi dan Pengamanan
PTDH	: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Renja	: Rencana Kerja
RI	: Republik Indonesia
Satfung	: Satuan Fungsi
Satker	: Satuan Kerja
SOP	: <i>Standard Operational Procedure</i>
SPN	: Sekolah Pendidikan Negara
Tunkin	: Tunjangan Kinerja
Turjawali	: Pengaturan, Pengawasan, dan Patroli
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
YME	: Yang Maha Esa



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Daftar Nama Kapolri	xxvii
Lampiran 2 Daftar Gaji Anggota Polri	xxix
Lampiran 3 Tri Brata	xxx
Lampiran 4 Catur Prasetya	xxxii
Lampiran 5 Form Wawancara Kadiv Hukum Polri	xxxiii
Lampiran 6 Hasil Wawancara 201 Polwan Bhayangkari	xxxiv

